STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PERCEPATAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Amreylia Irnadianis Hana Saputri
NPP. 33.0738
Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: amreyliaihs@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki,M.AP Email: wiwik@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Research Gap: This study focuses on the issue of suboptimal Child Identity Card (KIA) ownership in Palangka Raya City. In the second semester of 2024, KIA ownership reached only 74.21% of 92,499 children aged 0–17 years, leaving 25.79% without KIA. This condition is influenced by low public awareness, uneven socialization, extensive service coverage areas, and infrastructure constraints. Previous studies have mainly discussed policy implementation and service effectiveness, while studies examining strategies to increase public participation using the ASOCA framework remain limited. **Objective:** This study aims to analyze the strategy of the Department of Population and Civil Registration of Palangka Raya City in increasing public participation to accelerate KIA issuance. **Method:** A descriptive qualitative approach was employed. Data were collected through semi-structured interviews with 10 informants selected through purposive and incidental sampling, observations, and documentation. Data were analyzed using NVivo through data reduction, data display, and conclusion drawing based on the ASOCA framework consisting of Ability, Strength, Opportunity, Culture, and Agility. **Findings:** The Department has implemented various strategies, including the SI-DOI digital service, outreach programs, NAKAR ANTAH and ANAK ITAH innovations, cross-sector collaboration, and social media utilization. However, implementation has not been fully optimal due to low public awareness, limited human resources, extensive service areas, and internet network constraints. **Conclusion:** The strategy to enhance public participation in accelerating KIA issuance has been implemented fairly well but requires stronger public outreach, digital service optimization, staff capacity improvement, and broader collaboration with relevant stakeholders.

Keywords: Strategy; Public Participation; Child Identity Card (KIA); Population Administration; ASOCA.

ABSTRAK

Permasalahan (Research Gap): Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya. Pada Semester II Tahun 2024, kepemilikan KIA baru mencapai 74,21% dari total 92.499 anak usia 0–17 tahun, sehingga masih terdapat 25,79% anak yang belum memiliki KIA. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat, sosialisasi yang belum merata, luasnya wilayah pelayanan, serta kendala sarana dan prasarana. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan dan efektivitas pelayanan KIA, sedangkan kajian mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan pendekatan ASOCA masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mempercepat penerbitan KIA. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap 10 informan yang dipilih secara purposive dan insidental, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan NVivo melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teori ASOCA yang meliputi Ability, Strength, Opportunity, Culture, dan Agility. **Hasil/Temuan:** Disdukcapil Kota Palangka Raya telah menerapkan berbagai strategi melalui layanan digital SI-DOI, program jemput bola, inovasi NAKAR ANTAH dan ANAK ITAH, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan media sosial. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pelayanan, dan kendala jaringan internet. **Kesimpulan:** Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan penerbitan KIA telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan sosialisasi, optimalisasi layanan digital, peningkatan kapasitas aparatur, dan perluasan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: Strategi; Partisipasi Masyarakat; Kartu Identitas Anak (KIA); Administrasi Kependudukan; ASOCA.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk mencapai 286,6 juta jiwa, sehingga pengelolaan administrasi kependuduan menjadi sebuah tantangan yang tersendiri bagi pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang merata. Pemerintah memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan, yang diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum atas peristwa penting yang dialami warga negara (Rahman & Bura, n.d.). Salah satu layanan dasar yang wajib dipenuhi negara adalah penjaminan identitas hukum bagi seluruh warga negara termasuk anak-anak.

Wujud nyata pemenuhan hak identitas anak, pemerintah menerbitkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. KIA merupakan dokumen identitas resmi bagi anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah, yang diterbitkan secara gratis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di tingkat kabupaten/kota. Keberadaan KIA sangat penting untuk melindungi anak dari resiko eksploitasi, serta mempermudah akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Hak anak atas identitas bukan sekedar formalitas hukum, melainkan vital dalam memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Anak yang tidak memiliki dokumen identitas resmi beresiko menjadi non-pribadi hukum ditingkat nasional dan bahkan berpotensi mengalami statelessness di tingkat intersional

(Aniyie, 2025) KIA memiliki kegunaan yang sama dengan KTP-el, yaitu untuk persyaratan mendaftar sekolah, pembuatan paspor, membuka rekening tabungan anak, serta berlaku untuk mendaftar BPJS danb layanan publik lainnya(Madjid et al., n.d.). Hambatan dalam kepemilikan dokumen identitas anak juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang lebih luas. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa keengganan masyarakat untuk melapor, rendahnya tingkat melek huruf, serta akses yang tidak memadai ke daerah terpencil (Alvi et al., 2025).Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dengan populasi ±315.153 jiwa turut mengimplementasikan program KIA melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016. Berdasarkan data Disdukcapil semester II tahun 2024, dari 92.499 anak usia 0-17 tahun, sebanyak 68.646 anak (74,21%) telah memiliki KIA, semenntara 23.856 anak (25,79%) belum memilikinya. Meskipun capaian ini tergolong baik dibanding sejumlah daerah lain, masih terdapat kesenjangan antara target dan realisasi yang perlu ditangani.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnta KIA, belum optimalnya sosialisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta adanya anggapan bahwa pengurusan administrasi kependudukan rumit. Disdukcapil Kota Palangka Raya telah berupaya melalui berbagai strategi seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah, program jemput bola, dan inovasi lainnya. Sementara itu, pemanfaatan teknologi berbasis *deep learning* juga mulai dikembangkan untuk mendeteksi anomali data kependudukan dan memprediksi kesenjangan kepemilikan dokumen identitas antar wilayah sehingga intervensi kebijakan dapat tepat sasaran (Setiawan, 2025)

Secara akademik, masih terdapat research gap yang terkait kajian strategi peningkatan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci percepatan penerbitan KIA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mempercepat penerbitan KIA menggunakan kerangka teori ASOCA (*Ability,Strenght,Opportunity, Culture,Agility)*

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Palangka Raya, sementara itu program KIA merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat yang diamanatkan melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka memberikan perlindungan identitas dan pemenuhan hak konstitusional anak-anak Indonesia secara menyeluruh.

Keterbatasan akses wilayah menjadi permasalahan berikutnya. Kota palangka raya memiliki luas wilayah mencapai 2.853 km² yang terbagi dalam lima kecamatan dengan karakteristik demografis yang sangat beragam. Kondisi ini yang menyebabkan distribusi layanan KIA tidak dapat berjalan secara merata, sehingga anak-anak diwilayah terpencil tidak terjangaku oleh program sosialisasi yang dilakukan. Anggapan masyarakat bahwa pengurusan administrasi kependudukan rumit dan memakan waktu yang turut memperparah kondisi ini. Perspektif negative ini terbentuk dari pengalaman masa lalu masyarakat dalam berurusan dengan layanan administrasi yang Panjang dan belum sepenuhnya bergeser meskipun inovasi pelayanan telah dilakukan. Kondisi serupa juga dijumpai di Kabupaten Madiun, dimana inovasi layanan administrasi kependudukan berbasis online yang dikembangkan Disdukcapil justru menghadapi rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya sosialisasi, sehingga mayoritas masyarakat tetap memilih layanan konvensional meskipun layanan online jauh lebih mudah diakses.(Putri, 2023)

Kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan sarana prasarana di Disdukcapil Kota Palangka Raya juga menjadi faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan. Gangguan sistem jaringan yang kerap terjadi menghambat proses pencetakan KIA, sehingga waktu penyelesaian menjadi tidak pasti dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan. (Siagian et al.,

2019) yang mengkaji keterlibatan tenaga Kesehatan dalam pendaftaran kelahiran di Indonesia justru menegaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat merupakan hambatan structural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis kelembagaan, melainkan memerlukan strateg lintas sektor yang mempertimbangkan konteks lokal secara mendalam.

Meskipun berbagai studi telah membahas implementasi kebijakan KIA, efektivitas pelayanan dan strategi kelembagaan di berbagai daerah, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana strategi Disdukcapil dapat secara aktif mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci percepatan penerbitan KIA. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyaj berfokus pada aspek teknis pelayanan dan implementasi kebijakan secara kelembagaanm tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan dinamika keterlibatan aktif masyarakat dan pendekatan kultural yang relevan dengan konteks lokal, selain itu belum ada penelitian yang secara spesifik menggunakan kerangka ASOCA untuk menganalisis strayei percepatan KIA, khususnya diwilayah Kalimantan Tengah yang memiliki karakteristik geografis, sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan daerah-daerah yang telah diteliti sebelumnya.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris dan kontribusi keilmuan mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan pendekatan analisis ASOCA, mengisi kesenjangan literatur yang selama ini cenderung hanya menyoroti aspek kelembagaan dan digitalisasi. Secara substantif, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memetakan dan mengatasi hambatan sosial, kultural, serta teknis yang menyebabkan masih terdapat 25,79% anak di Kota Palangka Raya yang belum memiliki KIA, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan strategi pelayanan yang telah dilaksanakan, agar tetap relevan dan optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, Disdukcapil dan Pemerintah Kota Palangka Raya akan kehilangan landasan empiris untuk merumuskan kebijakan, sehingga strategi percepatan KIA beresiko stagnan dan tidak tepat sasaran. Akibatnya, pemenuhan hak identitas hukum dan akses layanan dasar anak terhambat, alokasi sumber daya tidak efisien, serta target kepemilikan KIA sulit tercapai secara berkelanjutan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinsipirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks strategi pelayanan public maupun partisipasi masyarakat dalam program administrasi kependudukan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai KIA memiliki variasi focus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Maghfiroh meneliti strategi kelembagaan Disdukcapil dalam program KIA mengguakan pendekatan analis kebijakan (Richard Rumelt) (Maghfiroh dll, 2022). Rahmawati dan Alfariz mengkaji pelayanan administrasi KIA secara daring dengan pendekatan digitalisasi layanan publik (Rahmawati&Alfariz,2021.)selanjutnya, Nur Rohman meneliti strategi implementasi kebijakan KIA menggunakan analisis SWOT (*Nur Rohman Dll* , n.d.)Rizqiya Anindia dan lain lain, mengkaji pasrtisipasi masyarakat dalam kepemilikian KIA menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan faktor sosial demografis dan deskriptif (Rizqiya Anindia dkk, 2023). Adapun Norita meneliti efektivitas pelayanan KIA dengan pendekatan evaluasi kinerja pelayanan publik (Norarita dkk., 2024.). Secara umum penelitian-penelitian tersebut menunjukkan keberagaman pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang

berbeda-beda sesuai focus kajian masing-masing, dan cenderung berfokus pada aspek kelembagaan, digitalisasi, efektivitas layanan atau implementasi kebijakan.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan kebaruan ilmiah dilihat dari segi konteks objek, yakni strategi peningkatan partisipasi masyarakat sebagai faktor kunci percepatan penerbitan KIA di Kota Palangka Raya yang memiliki karakteristik geografis yang khas. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan analisis matriks ASOCA yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung menggunakan pendekatan SWOT,Rumelt atau deskriptif. Kerangka teori yang digunakan juga berbeda yaitu mengadopsi analisis ASOCA dari (Suradinata,2013) yang mengintegrasikan dimensi *Culture* (kebudayaan dari persepsi masyarakat) serta *Agility* (Adaptasi organisasi) sebagai variabel strategis. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan strategi Disdukcapil secara lebih holistic dan kontekstual, sehingga mampu menjawab kesenjangan penelitian sebelunnya yang belu secara eksplisit mengkaji sinergi antara strategi kelembagaan dengan respons partisipatif asyarakat dala percepatan penerbitan KIA.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi yang telah diterapkan oleh Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

II. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, bukan dalam situasi eksperimen. Pemilihan pendekata ini didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak sekedar mengukur angka atau presentase penerbitan KIA, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam mendorong partisipasi masyarakat, termasuk dinamika, kendala dan upaya pengefektifannya. Dengan demikian, pendekatan kualitatif deksriptif dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas fenomena pelayanan public yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik semata (Sugiyono, 2022; Moleong, 2017).

Pengumpulan data dilakukan mealui tiga Teknik utama, yaitu wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik wawancara semi terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh infirmasi secara mendalam sekaligus memberikan kebebasan bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara terbuka, terutama mengenai strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerbitan KIA. Observasi partisipatif dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan Disdukcapil, mulai dari pengamatan terhadap proses penerimaan berkas, interaksi antara petugas dan masyarakat, hingga pelaksanaan program jemput bola di lapangan, serta dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, dan data agregat kepemilikan KIA.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive berdasarkan peranm kewenangan, dan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan maupun pelaksanaan program penerbitan KIA. Informan terdiri terdiri dari kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya sebagai informan kunci, karena beliau merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategi dan pengambilan keputusan di Disdukcapil. Informan lainnya juga mencakup dengan Kepala Bidang Pekayanan Pencatatn Sipil, Kepala

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, serta staf/operator pelayanan KIA yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Informan yang di ambil dari unsur masyarakat yaitu yang sedang mengurus maupun menerima layanan kia.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi Teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pejabat dinas, staf pelaksana, dan masyarakat pengguna layanan, sehinnga data yang diperoleh dapat saling mengonfirmasi. Triangulasi Teknik di lakukan dengan membandingkan hasil wawancara,observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kearutan temuan untuk mempertanggung jawabkan keabsahan data dalam penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo untuk membantu proses kodifikasi dan pemetaan data kualitatif secara sistematis. Hasil analisis kemudian dipetakan menggunakan kerangka teori ASOCA dari (Suradinata,2013) untuk menilai strategi DAisdukcapil secara komprehensif dari lima dimensi tersebut, sehingga mneghasilkan pemahaman yang mendalam tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan KIA di Kota Palangka Raya.

Penelitian ini dilaksanakan di Disdukcapil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selama kurang lebih satu bulan yaitu pada bulan januari sampai dengan februari 2026. Pengumpulan data mencakup observasi awal di kantor Disdukcapil maupun di lapangan seperti kegiatan jemput bola dan sosialisasi, pelaksana wawancara mendalam, pengumpulan dokumentasi, serta verifikasi data kepada informan. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan strategi dan kondisi pelayanan KIA secara aktual sesuai dengan dinamika program yang sedang berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) menggunakan kerangka teori ASOCA dari (Suradinata, 2013) yang mencakup lima dimensi, yaitu Ability (Kemampuan), Strenght (Kekuatan), Opportunity (Peluang), Culture (Budaya), dan Agility (Kecerdasan). Analisis ini dipilih karena tidak hanya mempertimbangkan kemampuan dan peluang organisasi semata, tetapi juga mengintegrasikan dimemsi budaya dan kecerdasan adaptif yang sangat relevan dalam konteks pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan keberagaman masyarakat Kota Palangka Raya. Hal ini sejalan dengan pandangan (Asadisarvestani, 2026) yang menegaskan bahwa hambatan dalam administrasi kependudukan tidak hanya bersifat operasional, tetapi juga tertanam dalam ketidaksetaraan structural, kerangka hukum dan faktor-faktor sosiokultural yang saling berinteraksi secara sinergis. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

3.1 Ability (kemampuan)

Penulis menganalisis dimensi Ability melalui tiga indicator utama yaitu, kemampuan analisis kebutuhan masyarakat, manajemen SDM, dan pemnafaatan data kependudukan sebagai dasar strategi. Pada indikator analisis kebutuhan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Palangka Raya telah memahami kebutuhan masyarakat melalui survei langsung dan evaluasi internal berkala setiap bulan. Tantangan utama yang ditemukan adalah kesenjangan digital dan luasnya wilayah pelayanan. Dari sisi operasional, strategi tersebut diperkuat dengan Langkah teknis yang memastikan masyarakat tidak gagal berpartisipasi hanya dengan persoalan admnistrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan berbasis online merupakan cikal bakal inovasi

dalam administrasi kependudukan, dan penggunaan whatsapp sebagai media penyampaian informasi terbukti menjadi salah satu pendekatan efektif dalam memudahkan masyarakat mempersiapkan dokumen dari jarak jauh tanpa harus datang langsung ke Kantor Disdukcapil. (Putri, 2023).

Pada indikator manajemen SDM, strategi Disdukcapil dalam mneingkatkan partisipasi maysarakat terlihat dari peningkatan kapasitas aparatur agar layanan menjadi efisien, ramah, dan responsif. Hal ini dikelola berdasarkan Analisis Sistem Manajemen yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. Pada indikator pemanfaatan data, Disdukcapil menggunakan data kependudukan sebagai dasar penentuan wilayah prioritas. Dari total 92.499 anak usia 0–17 tahun di Kota Palangka Raya, sebanyak 68.646 anak (74,21%) telah memiliki KIA, sedangkan 23.856 anak (25,79%) masih belum memilikinya. Kesenjangan ini menjadi dasar strategi pelayanan yang tidak disusun secara seragam, melainkan diarahkan pada kecamatan dengan capaian KIA terendah. Pendekatan berbasis data ini relevan dengan temuan Verma dkk. (2026) yang menunjukkan bahwa strategi pendaftaran yang menargetkan wilayah dan fasilitas dengan capaian terendah terbukti menghasilkan peningkatan cakupan yang paling signifikan, karena intervensi yang tepat sasaran mampu menjangkau kelompok yang paling rentan secara lebih efektif dibandingkan program yang bersifat seragam (Verma et al., 2026).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa meskipun strategi berbasis data sudah berjalan, tantangan berupa kesenjangan digital dan keterbatasan alat pelayanan bergerak masih memerlukan perhatian khusus, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan online.

3.2 Strength(Kekuatan)

Dimensi Strenght diukur melalui indikator kekuatan rgeulasi yang dimiliki Disdukcapil sebagai landasan pelaksanaan program KIA. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 2 Tahun 2016 memberikan kepastian hukum kepada Disdukcapil untuk membangun kerja sama lintas sektor dalam menertibkan adinistrasi kependudukan anak. Dalam konteks ini Asadisarvestani (2026) menekankan bahwa regulasi yang kuat merupakan fondais urama dalam sistem pendaftaran sipil; tanpa kepastian hukum yang memadai, program pendaftaram identitas anak cenderung menghadapi hambatan birokratis yang berulang dan sulit diatasi hanya melalui pendekatan teknis semata. Kekuatan regulasi dapat dilihat dari kemampuan Disdukcapil membuat inovasi, yakni menjalin kerja sama dengan sekolah, Dinas Pendidikan, rumah sakit, dan puskesmas, sehingga penerbitan KIA tidak di pandang sebagai tanggung jawab Disdukcapil semata, ,melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

3.3 Opportunity (Peluang)

Penulis menganalisis dimensi Opportunity melalui indikator utama, yaitu inovasi pelayanan dan kerja sama antar Lembaga. Pada indikator inovasi layanan, Disdukcapil Kota Palangka Raya telah mengembangkan beberapa terobosan strategis untuk mempercepat penerbitan KIA. Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Dinas menyatakan :

"Kami telah mengembangkan sejumlah inovasi strategis: pertama sistem layanan online SI-DOI yang memungkinkan masyarakat mendaftar dan mengunggah dokumen dari rumah; kedua program layanan jemput bola dengan petugas turun langsung ke kecamatan terpencil membawa alat biometrik mobile; ketiga loket khusus KIA yang terpisah dari layanan lainnya; dan keempat kolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk mengidentifikasi siswa yang belum memiliki KIA dan memberikan layanan langsung di sekolah tersebut."

Inovasi layanan berbasis digitak seperti SI-DOI ini sejalan dengan kategori inovasi sistem dapat dilihat dari keberhasilan SI-DOI dari data berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pengguna SI-DOI

Tahun	Permohonan Masuk (SI-DOI)	Berkas Lengkap	KIA Terbit	Persentase Penyelesaian
2023	1.243	987	952	76,59%
2024	3.876	3.104	3.047	78,62%
2025 (Sem. I)	2.541	2.189	2.156	84,85%

Sumber : Laporan sistem SI-DOI Disdukcapil Kota Palangka Raya, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa permohonan yang masuk mealui SI-DOI meningkat lebih dari tiga kali lipat dari tahun 2024. Selain itu inovasi yang di buat oleh Disdukcapil Kota Palangka Raya, yaitu inovasi kerja sama dengan rumah sakit atau yang disebut ANAK ITAH , Disdukcapil bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Kota Palangka Raya dan bekerja sama juga dengan beberapa sekolah TK/RA di Kota Palangka Raya yang disebut dengan inovasi Jemput Daya Nakar Antah (Nampa Kartu Identitas Anak Itah) sesuai dengan data berikut :

Tabel 2.
Jumlah pengguna inovasi ANAK ITAH

No.	Instansi/ Rumah Sakit	Semester I	Semester II	Jumlah
		KIA		
1.	RSUD Kota Palangka Raya	0	0	0
2.	RS Bhayangkara	118	146	264
3.	RS Permata Hati	8	4	12
	Jumlah			276

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Tabel 3.
Jumlah pengguna inovasu NAKAR ANTAH

No.	Nama Sekolah	Semester I	Semester II	Jumlah
1.	RA Nurul Hikmah	0	52	52
2.	RA Annisa 2	47	0	47
3.	TK Katimpun	15	0	15
4.	RA Al Hunafa	0	17	17
	Jumlah			131

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Hasil observasi lapangan memperkuat temuain ini. Pelibatan berbagai actor kelembagaan terbukti mendorong masyarakat yang sebelumnyapasif menjadi lebih mudah dijangkau, karena informasi dan layana. Hadir melalui pihak-pihak yang sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari.

3.4 Culture (budaya)

Penulis menganalisis dimensi culture melalui dua indikator, yaitu kesadaran masyarakat dan peran tokoh. Pada indikator ini kesadaran masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sebagian besar masyarakat masih belum memandang KIA sebagai kebutuhan mendasar bagi anak. Dikecamatan pinggiran seperti Rakumpit dan Bukit Batu, masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai masih menganggap bahwa identitas anak cukup dengan ikatan adat dan kartu keluarga. Kondisi ini selaras dengan temuan Asadisarvestani (2026) yang menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, tetapi juga oleh pandangan masyarakat yang belum menganggap dokumen identitas sebagai kebetuhan mendasar, terutama Ketika merasa bahwa identitas melalui ikatan adata atau dokumen keluarga sudah dianggap cukup dalam kehidupan seharihari (Asadisarvestani, 2026).`

Pada indikator peran tokoh, hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat, tokoh agama dan pemuka masyarakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penerimaan informasi tentang KIA. Disdukcapil menanggapi ini dengan menggandeng Dewan Perwakilan Adat Dayak (DPAD) Kota Palangka Raya sebagai mitra komunikasi. Strategi pelibatan tokoh komunitas ini didukung oleh temuan Asadisarvestani (2026) yang menegaskan bahwa komunitas yang secara budaya dan bahasa berbeda dengan birokrasi formal tidak akan terjangkau secara memadai oleh strategi komunikasi standar yang bersifat top-down dari pemerintah pusat. Sebaliknya, ketika informasi resmi disampaikan melalui saluran yang dipercaya dan dalam format yang dapat dipahami oleh komunitas tersebut, proses pendaftaran menjadi jauh lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dan tingkat kepatuhan pun meningkat secara signifikan (Asadisarvestani, 2026).

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kehadiran tokoh adat (Damang) yang duduk sejajar dengan perangkat daerah dalam forum sosialisasi menandai pergeseran paradigma pelayanan dari yang semula bersifat *top-down* menjadi kolaboratif berbasis komunitas. Penulis menyimpulkan bahwa strategi berbasis budaya ini bersifat adaptif dan menjadi jembatan penting antara dimensi teknis kelembagaan dan dimensi sosial masyarakat.

3.5 Agility (Kecerdasan)

Penulis menganalisis dimensi Agility melalui dua indikator, yaitu adaptasi teknologi dan resposivitas organisasi.Pada indikator adaptasi teknologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Palangka Raya tidak hanya bertahan pad apola pelayanan konvesional di kantor, tetapi secara aktif menyesuaikan strategi melalui layanan jemput bola, sistem pendaftaran online SI-DOI, dan pola komunikasi yang lebih fleksibel melalui WhatsApp serta media sosial.

Putri (2023) menegaskan bahwa pemanfaatan media sosial secara aktif dan konsisten merupakan kunci dalam memperluas jangkauan sosialisasi inovasi layanan; tanpa promosi yang masif melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp, inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang sesungguhnya berkualitas pun berisiko tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasarannya (Putri, 2023). Adaptasi ini penting mengingat era digital yang terus berkembang, namun aparatur juga perlu mendapatkan pelatihan teknis secara berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi berlangsung optimal di semua lini pelayanan.

Pada indikator responsivitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil cukup tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat. Hal ini terlihat dari tersedianya nomor layanan WhatsApp, akun media sosial resmi yang aktif, serta komunikasi langsung antara petugas dan masyarakat ketika kendala terjadi di lapangan.Semakin responsif aparatur dalam menanggapi kebutuhan dan pertanyaan masyarakat, semakin besar kepercayaan yang terbentuk, dan kepercayaan tersebut pada akhirnya menjadi penggerak partisipasi yang organik dari masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan analisis menggunakan kerangka ASOCA, penulis menyimpulkan bahwa strategi Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk percepatan penerbitan KIA telah berjalan cukup baik, dengan capaian 74,21% anak telah memiliki KIA dari total 92.499 anak usia 0–17 tahun. Namun demikian, masih terdapat 25,79% anak yang belum memiliki KIA, yang menunjukkan bahwa strategi perlu terus diperkuat terutama pada aspek pemerataan sosialisasi, penambahan sarana biometrik mobile, penanggulangan kesenjangan digital, dan pendekatan kultural yang lebih intensif di kecamatan-kecamatan terpencil.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Disdukcapil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk percepatan penerbita KIA dilakukan penguatan kemampuan organisasi, pemanfaatan regulasi, inovasi pelayanan, pendekatan budaya, serta adaptasi teknologi. Strategi tersebut terlihat melalui layanan digital SI-DOI, program jemput bola, loket khusus KIA, kerja sama dengan sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp dan media sosial. Temuan ini memperlihatkan bahwa percepatan penerbitan KIA tidak hanya bergantung pada pelayanan administratif di kantor Disdukcapil, tetapi juga membutuhkan strategi aktif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa strategi Disdukcapil telah meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses wilayah, kekurangan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum merata, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Layaknya sama dengan temuan Putri (2023), inovasi pelayanan berbasis online dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dalam penelitian ini, SI-DOI menjadi salah satu bentuk inovasi yang membantu masyarakat mengurus KIA tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Nur Rohman dkk, yang menyatakan bahwa percepatan penerbitan KIA membutuhkan kerja sama lintas sektor, seperti kelibatan sekolah, rumah sakit, puskesmas dan instansi terkait lainnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada implementasi kebijakan, penelitian ini lebih menyoroti strategi peningkatan partisipasi masyarakat sebagai faktor penting dalam percepatan penerbitan KIA.

Sama halnya dengan temuan Anindia dkk. (2023), rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KIA dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kondisi geografis, sarana prasarana, dan dukungan pemerintah. Dalam penelitian ini, masih ditemukan masyarakat yang belum menganggap KIA sebagai dokumen penting bagi anaknya. Sebagian masyarakat baru mengurus KIA Ketika dibutuhkan untuk keperluan tertentu, seperti pendaftaran sekolah atau akses layanan publik lainnya.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa percepatan penerbitan KIA tidak cukup hanya dilakukan melalui pelayanan adiministrasi biasa, tetapi harus didukung oleh inovasi pelayanan, sosialisasi, Kerjasama lintas sektor, dan pendekatan langsung kepada masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka ASOCA yang tidak hanya melihat kemampuan organisasi, tetapi juga

memperlihatkan kekuatan, peluang, budaya masyarakat, dan kecerdasan adaptif Disdukcapil dalam mneingkatkan partisipasi masyarakat.

3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu faktor pendukung percepatan penerbitan KIA di Kota Palangka Raya adalah adanya kerja sama lintas sektor yang cukup kuat antara Disdukcapil dengan sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta informasi kepada masyarakat sehingga pelayanan KIA dapat menjangkau lebih banyak anak tanpa harus menunggu masyarakat datang ke kantor Disdukcapil.

Temuan lainnya, menunjukkan bahwa inovasi pelayanan seperti SI-DOI, NAKAR ANTAH dan ANAK ITAH membantu mempermudah akses masyarakat dalam mengurus KIA. Inovasi tersebut mampu mengurangi hambatan jarak dan meningjatkan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan.

Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KIA masih menjadi faktor penghambat utama, sebagian masyarakat baru mengurus KIA ketika dokumen tersebut diperlukan untuk keperluan pendidikan atau pelayanan tertentu.

Luasnya wilayah Kota Palangka Raya serta keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah menyebabkan pelayanan dan sosialisasi KIA belum dapat menjangkau seluruh masyarakat secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan digital masih perlu didukung dengan program jemput bola dan pelayanan langsung di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) tekah berjalan cukup baik melalui penguatan kemampuan organisasi, pemanfaatan regulasi, inovasi pelayananm kerja sama lintas sektor, pendekatan budaya, serta adaptasi teknologi. Strategi tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan layanan digital SI-DOI, program jemput bola, loket khusus KIA, kerja sama sekolah, rumah sakit, puskesmas, serta pemanfaatan WhatsApp dan media sosial sebagai sarana komunikasi pelayanan. Strategi tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses wilayah, gangguan jaringan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan. Secara keseluruhan percepatan penerbitan KIA perlu terus diperkuat melalui pemerataan sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi layanan digital, penambahan sarana pelayanan bergerak, serta penguatan pendekatan kultural kepada masyarakat.

Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat dan hanya berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagai lokus penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualtatif sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap strategi pelayanan dan partisipasi masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work).* Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji strategi percepatan penerbitan KIA pada wilayah lain dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang berbeda, serta dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran agar hasil penelitian menjadi lebih luas dan komprehensif. Sekaran

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alvi, Z., Qureshi, A. A., Danish, W., & Munir, L. (2025). Establishment of a centralized civil registration and vital statistics (CRVS) database in Pakistan:
A healthcare perspective. *Discover Public Health, 22*, 315. https://doi.org/10.1186/s12982-025-00705-4

Anindia, R., Warsono, H., & Santoso, R. S. (2023). Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA): Studi kasus Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Journal of Public Policy and Management Review, 12*(4),
246–263. https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i4.41163

Aniyie, I. A. (2026). Legal pluralism and child identity: The interplay of Igbo worldview and English traditions in *Chinweze & Anor v Masi & Anor*. *Journal of Asian and African Studies, 61*(3), 2291– 2308. https://doi.org/10.1177/00219096251339092

Asadisarvestani, K. (2026). Structural, economic and sociocultural barriers to birth and death registration in Iran: A qualitative study. *International Journal for Equity in Health, 25*, 25. https://doi.org/10.1186/s12939-025-02744-4

Madjid, U., Nurrahman, A., & Effendi, R. (2021). Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Registratie, 3*(1), 41–53. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v3i1.2361

Maghfiroh, A. F., Mulyani, S., & Fadlurrahman. (2022). Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara (JMAN), 6*(1), 1–9. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/jman

Mahendra, I. G. A. (2023). Optimalisasi program pendewasaan usia perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Registratie, 5*(2), 120–141. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683

Norarita, Arsyad, M., & Noorrahman, M. F. (2024). Efektivitas pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Pelayanan Publik, 1*(1), 37–44. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/jpp

Putri, L. R. (2023). Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dengan online (PAK'DE ON) melalui aplikasi WhatsApp dan inovasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pengadilan agama (DIDUPAG) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun. *Jurnal Registratie, 5*(1), 53–68. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3229

Rahman, S., & Bura, A. F. (2025). Efektivitas Anjungan Dukcapil Mandiri dalam peningkatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Registratie, 7*(1), 35–49. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i1.5560

Rohman, N., Lestari, E. W. T., & Sufianti, E. (2021). Strategi implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8*(1), 130–141. https://doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4606

Setiawan, M. R. (2025). Penerapan deep learning untuk analisis big data kependudukan: Menuju efisiensi dan akurasi pelayanan pemerintah. *Jurnal Registratie, 7*(2), 111–127. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v7i2.5572

Siagian, C., Wandasari, W., Sahputra, F., & Kusumaningrum, S. (2019). Strategic yet delicate: The dilemma of involving health workers in facilitating birth registration in Indonesia. *BMC Health Services Research, 19*, 889. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4594-z

Sururama, R., & Permana, A. F. B. (2021). Pelayanan administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Semarang Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi, 3*(2), 64–79. https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2478

Verma, S., Jana, S., Kamal, R., Dwivedi, L. K., & Halli, S. S. (2026). Strengthening civil registration through grassroots health institutions in India. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 23*(2), 257. https://doi.org/10.3390/ijerph23020257